



# nawaja

Edisi 02, Vol. 09

Model Good Court Governance di Mahkamah Konstitusi

**Jurnal Integritas:**

- Teori pilihan rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia
- Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha di Indonesia: Solusi dan Celah Korupsi

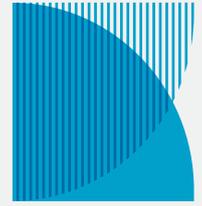
**Koleksi Buku Bulan Ini:**

- *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*
- *Mengawal Demokrasi Konstitusional*
- *Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*
- *Haluan Konstitusi Bernegara*
- *Hak Konstitusional*
- *Hak Konstitusional Anak*

**Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK**  
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada  
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

**Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK**  
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said  
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

# Struktur Pengaturan Pengadilan di Mahkamah Konstitusi



Resensi buku "Model Good Court Governance di Mahkamah Konstitusi"

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi penyelesaian perkara bagi setiap warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukumnya, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Selain itu, independensi lembaga ini juga menjadi fokus utama, dengan kebebasan untuk mengadili secara adil dan tanpa intervensi eksternal. Struktur pengaturan pengadilan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga tegaknya supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara.

Buku yang ditulis oleh Dr. Andi Hakim membahas berbagai aspek penting dari tata kelola pengadilan, termasuk independensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penulis menyoroti pentingnya independensi pengadilan sebagai landasan bagi kepercayaan publik dan penegakan hukum yang efektif. Beliau juga menjelaskan bagaimana struktur dan proses internal pengadilan harus dirancang untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hukum. Bukan pada kepentingan politik atau pihak lain.

Akuntabilitas pengadilan juga disinggung didalamnya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Penulis menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama pentingnya transparansi dalam proses pengadilan, termasuk akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memahami dan mengikuti proses hukum.



Dengan menggunakan studi kasus dari berbagai ahli yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diimplementasikan dalam praktik. "Model Good Court Governance" menjadi sumber yang berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam memperkuat sistem peradilan di negara mereka.

Namun karena terbatasnya konteks yang hanya terfokus pada satu konteks hukum tertentu, sehingga tidak selalu relevan atau dapat diaplikasikan secara langsung di tempat lain. Variasi dalam sistem hukum, budaya, dan politik antar negara dapat membuat beberapa rekomendasi kurang dapat diterima atau berguna di tempat lain.

Dengan bahasa yang jelas dan pendekatan yang sistematis, buku ini cocok sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami dan meningkatkan tata kelola pengadilan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Penulis : Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A  
Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada  
Tahun Terbit : 2023  
Tebal Buku : 292

**Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia**  
*Using rational choice theory to understand corruption in Indonesia*

Choky R. Ramadhan



Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan tindak pidana dan upaya untuk mencegah serta menghukum pelakunya (*deterrence effect*). Menurut teori ini, pelaku tindak pidana secara rasional mempertimbangkan kebahagiaan dan penderitaan yang akan diperoleh dari melakukan tindak pidana. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada rasionalitas pelaku tindak pidana. Artikel ini memperinci kumpulan studi tentang teori pilihan rasional tersebut dan mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi. Literatur mengenai tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan serta pemberantasannya banyak yang terkait dengan teori pilihan rasional. Selain itu, artikel ini berupaya menggunakan teori pilihan rasional untuk memahami pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan puluhan video inspeksi mendadak (*sidak*), wawancara pelaku dan pemberitaan yang tersedia untuk publik, serta wawancara beberapa pihak yang pernah mengunjungi Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin menjadi lokasi yang menarik karena narapidana telah dihukum melakukan tindak pidana korupsi, tetapi masih tetap melakukan praktik koruptif di dalamnya. Pemahaman terhadap alasan dan pola korupsi dapat memperkaya penjelasan mengenai korupsi di Indonesia dengan menggunakan analisis teori pilihan rasional.

**Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha di Indonesia:**  
**Solusi dan celah korupsi**

*Public-Private Partnership in Indonesia:*  
*Solutions and corruption loopholes*

Diaz Adiasma, Didik Mulyanto, Fitriani Nurza, Hilda Alatas



Kita perlu memahami lebih jauh terkait dengan Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), karena masih banyak orang menganggap KPBU sebagai solusi tanpa risiko. Hal ini terjadi karena sumber pendanaan utama yang digunakan dalam KPBU adalah dana dari sektor privat/ swasta. Saat ini KPBU telah menjadi solusi atas keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, yang notabene menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun KPBU bukanlah sebuah solusi tanpa cela, karena masih ada beberapa titik lemah dan celah korupsi yang patut diwaspadai. Melalui studi literatur ini, penulis menggabungkan hasil kajian terkait pelaksanaan KPBU jalan tol di Indonesia dengan kajian KPBU/PPP yang lain untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah korupsi KPBU di Indonesia. Beberapa proyek KPBU di Indonesia terindikasi menjadi "*white elephant*", hal ini mengindikasikan buruknya perencanaan dan alokasi sumber daya KPBU. KPBU juga berpotensi menjadi instrumen untuk menciptakan "*fiscal illusion*" bagi pemerintah. Sementara itu, kontrak KPBU jalan tol di Indonesia juga terindikasi masih memiliki celah korupsi. Berdasarkan kajian jalan tol yang penulis lakukan sebelumnya, diketahui bahwa kontrak KPBU menjadi titik rawan yang dapat menciptakan celah korupsi.





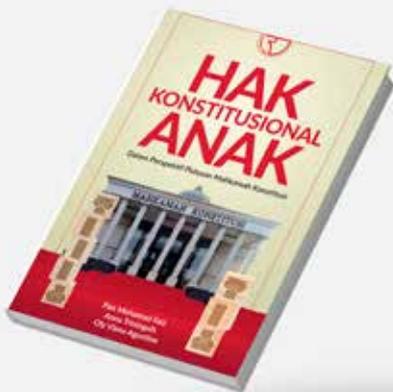
### Haluan Konstitusi Bernegara

Karya yang memberikan analisis atau pemikiran tentang isu-isu yang dibahas dalam konteks konstitusi dan negara.



### Hak Konstitusional

Merupakan kajian akademik yang menawarkan gagasan baru di bidang hukum tata negara, secara khusus mengenai hak konstitusional.



### Hak Konstitusional Anak

Membahas secara komprehensif mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi dan mengembalikan hak-hak anak yang tercederai.



# nawaja

Edisi 02, Vol. 09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK  
Scan untuk informasi lebih lanjut

